

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Penelitian Implementasi Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan dan menganalisisnya untuk mengetahui apakah proses implementasi program berhasil atau tidak.

Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara dan dokumentasi mengenai proses implementasi program KTM Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan di analisis menggunakan model implementasi Ripley dan Franklin, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program KTM Lunang Silaut belum berhasil. Hal-hal yang menyebabkan tidak berhasilnya pelaksanaan program KTM adalah dilihat dari variabel kepatuhan (*compliance*) masih banyak implementor yang tidak mematuhi ketentuan pelaksanaan program baik UPTD KTM, POKJA KTM Kabupaten, POKJA KTM Provinsi dan Tim Pendamping. Implementor tersebut banyak tidak melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Ketidapatuhan ini terjadi sebagai akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman implementor terhadap program.

Apabila dilihat dari variabel *What happening*, yang menyebabkan tidak berhasilnya pelaksanaan program KTM Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan

berdasarkan indikator *number and identity* adalah jumlah implementor yang banyak sehingga semakin banyak implementor akan semakin kompleks pelaksanaan program. Namun dari banyaknya implementor program KTM, implementor utama justru tidak ada yakni UPTDK KTM yang menyebabkan pelaksanaan program banyak yang tidak berjalan sesuai ketentuan. Pada sub-indikator *lock of hierarchy* (ketiadaan hierarki), garis hierarki antar implementor maupun implementor dengan *target group* dalam pelaksanaan program KTM sangat jelas. Permasalahan terjadi dalam koordinasi antara UPTD KTM/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan POKJA KTM Kabupaten dan POKJA KTM Provinsi yakni dalam pelaksanaan program tidak terjadi koordinasi antara UPTD KTM/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan POKJA KTM Kabupaten dan Provinsi sementara implementor sendiri tidak menekankan pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan program kerja setiap implementor. Hal tersebut menyebabkan para implementor tidak merasa terikat dalam pelaksanaan program dan cenderung abai terhadap program sehingga dapat mengganggu pencapaian tujuan program.

Berdasarkan indikator *The Proliferation and Complexity of Government Programs* (perkembangan dan kerumitan program pemerintah), terdapat tumpang tindih pelaksanaan program dalam implementasi program KTM yang dapat mempengaruhi keberhasilan program KTM Lunang Silaut. Pada indikator *The Participation of Government Units at All Territorial Levels* (partisipasi pada setiap unit pemerintah), pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat belum aktif berpartisipasi dalam menyukseskan program KTM karena terbatasnya sarana pendukung program serta belum maksimalnya anggaran

pelaksanaan program dari setiap OPD yang menjadi anggota POKJA KTM Kabupaten dan Provinsi.

Pada indikator *The Uncontrollable Factors That Affect Implementation* (faktor-faktor tidak terkendali yang mempengaruhi pelaksanaan program), faktor-faktor yang tidak terkendali dalam program KTM Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan adalah kondisi kawasan KTM yang didominasi lahan gambut dan rawa sehingga rawan banjir dan sulit dalam berbagai aktivitas pembangunan infrastruktur. Hujan yang terjadi selama berhari-hari juga menghambat banyak pembangunan infrastruktur KTM. Faktor tak terkendali lainnya adalah masyarakat yang tidak terbiasa dengan pasar bertingkat sehingga rantai dua pasar induk KTM sepi pembeli dan merugikan pedagang tersebut. Kemampuan pengelola lembaga usaha yang tidak memadai juga menjadi kendala yang sulit dikendalikan implementor yang menyebabkan tidak berjalannya sebagian besar lembaga usaha ekonomi KTM.

Faktor-faktor yang telah peneliti kemukakan di atas merupakan penyebab kegagalan dan tidak tercapainya tujuan pelaksanaan program KTM Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka diberikanlah saran yang dapat memperbaiki serta menyempurnakan pelaksanaan program KTM Lunang Silaut. Berikut saran-saran yang peneliti kemukakan:

1. Merangkul semua implementor untuk lebih aktif dengan membuat ketentuan yang mengikat disertai sanksi agar semua implementor berkontribusi dalam pelaksanaan program KTM.
2. Meningkatkan sosialisasi antar implementor terutama mengenai tupoksi agar semua implementor mengetahui dan memahami tupoksinya.
3. Membentuk UPTD KTM dan melengkapi sarana prasarana dan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sehingga tidak ada lagi tumpang tindih peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Jika perlu bentuk UPTD dengan proses seleksi dan berikan insentif berupa gaji sehingga mereka terikat dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugasnya.
4. Kepala daerah harus terlibat aktif memberikan komando seluruh anggota POKJA KTM agar dapat memberikan sumbangsinya kepada KTM.
5. Lakukan perumusan program tahunan KTM sebelum OPD pada POKJA KTM merampungkan anggaran tahunan agar mereka bisa mengarahkannya untuk program KTM.
6. Libatkan swasta sebagai mitra badan usaha ekonomi KTM dan investor pada infrastruktur ekonomi KTM.
7. Giatkan pelatihan dan pendampingan penggunaan alat-alat dan mesin pengolahan pada lembaga usaha ekonomi KTM